**Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh:
Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan**

Muhammad Haekal
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
muhammad.haekal@ar-raniry.ac.id

Abstract: *This study analyzed the implementation of inclusive policies in Aceh Province starting from 2012 to 2020. The analysis was based on three aspects: culture, policy, and implementation. This study used a qualitative approach, in which the document analysis was applied as the primary method in this research. The document used was the Aceh Governor Regulation No. 92 of 2012 on the Implementation of Inclusive Education. The study results stated that the Aceh Government had not appropriately implemented the three elements of inclusive education in Aceh. The Aceh government had to strive to develop the foundation of inclusive education. This study suggests that the local government of Aceh should implement inclusive education using the Index for Inclusion and start by strengthening an inclusive culture before moving on to policy and implementation.*

Keywords: *Education Management, Educational Policy, Inclusive Education, Special Needs Children*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan inklusif di Provinsi Aceh yang mulai tahun 2012 hingga 2020. Analisis tersebut bertumpu pada tiga aspek yaitu budaya, kebijakan, dan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama penelitian. Dokumen yang digunakan adalah Peraturan Gubernur Aceh No. 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga elemen pendidikan inklusi di Aceh belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Aceh harus bekerja lebih keras untuk membangun fondasi pendidikan inklusi. Studi ini menyarankan agar pemerintah daerah Aceh menerapkan pendidikan inklusif dengan menggunakan Index for Inclusion dan memulai dengan memperkuat budaya inklusif sebelum melanjutkan ke kebijakan dan implementasi.*

Keywords: *Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus*

Pendahuluan

Pada tahun 2012, Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan inklusif yang menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi inklusif di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa

berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa reguler. Hingga tahun 2020, ternyata implementasi kebijakan tersebut masih menemui berbagai kendala.

Pendidikan inklusif sendiri penting untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak belajar. Hal tersebut juga dapat meningkatkan toleransi dan rasa memiliki di antara peserta didik¹ serta merupakan sistem yang efektif untuk melawan praktik diskriminasi².

Terlepas dari harapan yang dibawa oleh kebijakan tersebut, tantangan tetap ada. Sebagai contoh, pelaksanaan kebijakan di Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh, masih menghadapi banyak kendala³, termasuk di antaranya tantangan dalam merumuskan kurikulum inklusif yang sesuai bagi seluruh peserta didik, manajemen kelas, serta masalah yang lebih mendasar seperti kurangnya guru berlatar-belakang keilmuan Pendidikan Luar Biasa⁴. Jika permasalahan masih terjadi di ibu kota, yang notabene memiliki sumber daya paling baik di suatu provinsi, bagaimana dengan kabupaten-kabupaten lain?

Kajian ini akan membahas tentang konsep pendidikan inklusif yang baik dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di Aceh. Pada akhirnya, studi ini akan membahas kemungkinan solusi yang diharapkan akan berkontribusi pada implementasi pendidikan inklusif yang ideal. Perbedaan penelitian konseptual ini dengan kajian-kajian sebelumnya, khususnya yang berlangsung di Indonesia, adalah penggunaan *Index for Inclusion*⁵ sebagai kerangka utama analisis.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama penelitian. Analisis dokumen adalah prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen—baik materi cetak maupun elektronik (berbasis komputer dan ditransmisikan melalui Internet)⁶. Dokumen yang peneliti gunakan adalah Peraturan Gubernur Aceh No 92

¹ Lay Wah Lee and Hui Min Low, "Unconscious' Inclusion of Students with Learning Disabilities in a Malaysian Mainstream Primary School: Teachers' Perspectives," *Journal of Research in Special Educational Needs* 13, no. 3 (July 1, 2013), p. 218–28.

² Mel Ainscow, "Education for All: Making It Happen," *Support for Learning* 10, no. 4 (1995), p. 147–55.

³ ery Wati, "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 14, no. 2 (2014).

⁴ Muhammad Hasan, "Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 54 Yayasan Tahija Banda Aceh (Suatu Kajian Tentang Interaksi Edukatif)," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2016).

⁵ Tony Booth and Mel Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. (ERIC, 2002).

⁶ Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal*, 2009.

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif⁷. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai komparasi. Sebagai pembandingan dalam tahapan analisis data, studi ini menggunakan *Index for Inclusion*⁸.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Pendidikan Inklusif yang Baik

Inklusi dalam pendidikan merupakan salah satu jembatan inklusi dalam masyarakat⁹. Artinya, pendidikan inklusif berpeluang menjadi salah satu batu pijakan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera untuk semua orang. Secara singkat, Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 92 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik (terlepas dari kondisi fisik, mental, intelektualitas, dsb) untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan belajar¹⁰. Dalam konsepnya, pendidikan inklusif ini dilangsungkan mulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat). Pergub tersebut juga menyebutkan, selain bertujuan menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh peserta didik, peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta menghapuskan praktik diskriminatif dalam pendidikan.

Ada tiga tahapan dalam pendesainan pendidikan inklusif yang baik menurut *Index for Inclusion*. Yang pertama adalah menciptakan budaya inklusi.

Gambar 1. Tiga Dimensi Indeks Pendidikan Inklusif¹¹.

⁷ Gubernur Aceh, "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif" (Banda Aceh, Indonesia, 2012), <https://tkppa.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/15/peraturan-gubernur-aceh-92-tahun-2012.html>.

⁸ Booth and Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*.

⁹ Booth and Ainscow.

¹⁰ Gubernur Aceh, "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif."

¹¹ Booth and Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*.

Budaya inklusif adalah dimensi di mana nilai-nilai inklusif dipahami dengan baik, dihormati, dan diterapkan oleh staf, siswa, pemangku kebijakan, dan orang tua/pengasuh. Sulit membayangkan jika kebijakan pendidikan inklusif dicanangkan ketika masyarakat misalnya, masih percaya bahwa siswa berkebutuhan khusus dapat menularkan penyakit pada siswa lain. Atau di contoh lain, ketika lulusan berkebutuhan khusus ditolak melamar pekerjaan hanya karena kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, dengan menerapkan budaya inklusif sebagai dasar dari pendidikan inklusif, orang-orang akan memahami makna, praktik, dan manfaat dari inklusi bagi seluruh masyarakat sebelum mereka menjalankan kebijakan atau implementasi nyata dari sistem tersebut.

Untuk membangun budaya inklusif, ada dua tahapan: Yang pertama adalah membangun komunitas dengan mengelola tujuh indikator penting: 1) setiap orang disambut dengan hangat; 2) siswa membantu satu sama lain; 3) staf (guru, kepala sekolah, staf lain) berkolaborasi satu sama lain; 4) staf dan siswa sepenuhnya memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat; 5) staf dan orang tua/wali berkomitmen berkolaborasi bersama; 6) staf dan pemangku kebijakan daerah bekerja sama; dan 7) semua elemen masyarakat ambil bagian dalam sekolah inklusif. Berikutnya pembangunan nilai-nilai inklusif mesti memerhatikan indikator berikut: 1) ada harapan besar bagi setiap siswa; 2) staf, pemangku kebijakan, siswa, dan orang tua/wali memahami filosofi pendidikan inklusif; 3) siswa diperlakukan sama; 4) staf dan siswa saling menghormati sebagai sesama manusia; 5) staf mencoba menghilangkan hambatan untuk semua aspek proses belajar-mengajar; dan 6) sekolah berusaha keras untuk mengurangi segala macam diskriminasi.

Tahap selanjutnya adalah menghasilkan kebijakan inklusif. Artinya, kebijakan harus diserap oleh rencana sekolah dan juga memotivasi siswa dan staf untuk secara kolaboratif berpartisipasi dalam agenda inklusi. Pada tahap ini, para pemangku kebijakan didorong untuk memenuhi semua kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan reguler, serta berupaya mengurangi hambatan. Staf, orang tua/wali, dan masyarakat sebagai komunitas yang besar juga mesti mendukung rencana tersebut dengan langsung berkolaborasi dalam proses.

Untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dilakukan melalui tahapan: Pertama, mengembangkan sekolah untuk semua dengan mengelola enam indikator: 1) menerapkan metodologi dalam merekrut dan mempromosikan staf di sekolah; 2) membantu semua staf baru dalam memahami nilai-nilai sekolah inklusif; 3) sekolah menerima dengan tulus siswa dan beragam kondisinya; 4) mendirikan bangunan sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap siswa; 5) membantu semua siswa baru untuk beradaptasi di sekolah inklusif, dan 6) mengatur kelompok pembelajaran untuk mendukung setiap siswa. Kedua, mengorganisir dukungan untuk keragaman siswa dengan memerhatikan delapan indikator: 1) mengkoordinasikan semua jenis dukungan; 2) membantu staf

untuk mendukung kebutuhan siswa; 3) kebijakan 'pendidikan luar biasa' memiliki arti yang sama dengan kebijakan inklusi; 4) Tata cara Pendidikan Luar Biasa diterapkan untuk meminimalkan hambatan untuk belajar dan partisipasi di kalangan siswa; 5) menghubungkan kebijakan pembimbingan dan perilaku dengan pengembangan kurikulum dan kebijakan pendukung pembelajaran; 6) mengurangi tekanan eksklusif; 7) mengurangi hambatan dalam hal partisipasi atau kehadiran siswa; dan 8) meminimalisasi perundungan.

Tahap terakhir yang utama adalah mengembangkan praktik inklusif yang menerapkan inklusi berdasarkan budaya dan kebijakannya. Hal ini membutuhkan partisipasi setiap anggota masyarakat untuk memberikan dukungan belajar dan menyediakan ruang yang besar agar inklusi menjadi wujud dalam semua aspek kehidupan sosial.

Untuk menerapkan praktik inklusif, ada dua tahap: Pertama, merencanakan pembelajaran dengan menjunjung sebelas indikator: 1) pengajaran direncanakan dengan format yang melibatkan siswa berkebutuhan khusus dan reguler; 2) pelajaran mendorong siswa untuk berpartisipasi secara kolaboratif dalam proses pembelajaran; 3) pelajaran mengembangkan pemahaman tentang keanekaragaman; 4) siswa terlibat aktif dalam proses belajar mereka sendiri; 5) siswa belajar secara kolaboratif; 6) penilaian berperan memotivasi siswa dalam mencapai tujuan; 7) rasa hormat adalah inti dari pembelajaran; 8) guru bekerja secara kolaboratif; 9) adanya dukungan asisten pengajar terkait partisipasi siswa; 10) pekerjaan rumah mendukung untuk memupuk semangat belajar; dan 11) semua siswa terlibat dalam kegiatan di luar kelas. Kedua, memobilisasi sumber daya dengan memperhatikan lima indikator: 1) pengajaran dan pembelajaran dirancang berdasarkan keragaman siswa; 2) keahlian staf dimanfaatkan sepenuhnya; 3) staf mengembangkan sumber daya untuk mendukung partisipasi siswa dalam pembelajaran; 4) sumber daya komunitas dimanfaatkan; dan 5) sumber daya sekolah didistribusikan dengan baik untuk mendukung inklusi.

Analisis Kesiapan Tiga Aspek

Budaya

Penolakan terhadap siswa berkebutuhan khusus oleh beberapa guru dan orang tua di beberapa daerah di Aceh, dengan alasan antara lain karena mereka menganggap peserta didik berkebutuhan khusus akan menularkan 'penyakit' untuk siswa reguler¹², menunjukkan bahwa budaya inklusif belum mapan di antara masyarakat. Padahal, di beberapa sekolah di Aceh, simpati antara orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan orang

¹² Cut A. Meutia, "Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus," Serambi Indonesia, April 3, 2014, <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/03/pendidikan-inklusif-bagi-anak-berkebutuhan-khusus>.

tua siswa reguler dapat ditemukan¹³. Di sisi lain, penolakan dari pemilik bisnis untuk mempekerjakan kebutuhan orang khusus¹⁴ juga bisa memberikan sinyal bahwa dalam dimensi sosial yang lebih luas, inklusi belum dimengerti. Studi terbaru di Aceh juga mengonfirmasi bahwa penerimaan warga sekolah terhadap siswa berkebutuhan khusus masih dalam kategori kurang baik¹⁵. Warga sekolah yang dimaksud adalah setiap anggota masyarakat yang berkegiatan di sekolah, termasuk siswa, guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya.

Secara umum, alasan mengapa masalah itu terjadi berpotensi disebabkan karena pemerintah belum memberikan sosialisasi yang komprehensif mengenai pendidikan inklusif di level akar rumput. Inklusi adalah aksi komunitas. Oleh karena itu, semua pihak, dari pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, pemilik bisnis, dan semua anggota masyarakat anggota mesti memahami inklusi dan peran mereka dalam gerakan ini. Terlebih, terdapat pula studi di Aceh yang menunjukkan sikap orang tua yang kurang siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus¹⁶. Di samping itu, Pergub Aceh Nomor 92 Tahun 2012 juga tidak menyentuh secara khusus mengenai urgensi pembangunan budaya inklusif, dan lebih condong ke tahap pelaksanaan atau implementasinya.

Peneliti mengakui bahwa di level budaya ini, implementasinya tidak mudah, terlebih untuk hal baru seperti pendidikan inklusif. Di konteks pendidikan misalnya, sekolah-sekolah yang tidak memiliki program pendidikan luar biasa terbukti mengalami keterbatasan informasi terkait pendidikan inklusif¹⁷. Fenomena ini dapat menyebabkan guru mengeluarkan asumsi yang salah atau penilaian yang tidak tepat tentang pendidikan inklusif terlebih sekolah secara institusi juga dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi, dan dominasi ras, bahasa, atau jenis kelamin¹⁸.

Oleh karena itu, dengan melihat fakta bahwa kebijakan pendidikan inklusif belum dipahami oleh semua anggota masyarakat, peneliti berpendapat bahwa pemerintah Aceh belum membangun budaya inklusif di antara masyarakat secara mendalam dan menyeluruh, dan malah cenderung lebih fokus tahap pelaksanaan atau implementasi.

¹³ Wati, "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh."

¹⁴ I Irwanto, "Analysis On The Situation Of People With Disability In Indonesia: A Desk Review" (Jakarta: Centre For Disability Studies, University of Indonesia, 2010).

¹⁵ Istifa Daturrohman, Syaiful Bahri, and Fajriani Fajriani, "Penerimaan Sosial Warga Sekolah Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Pada SMPN Inklusi Di Banda Aceh," *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling* 5, no. 3 (2020).

¹⁶ Dian Ayuningtyas, Rahmad Syah Putra, and Della Defyanti, "Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) Di Paud Terpadu Griya Ceriya Banda Aceh," 2019.

¹⁷ Lee and Low, "'Unconscious' Inclusion of Students with Learning Disabilities in a Malaysian Mainstream Primary School: Teachers' Perspectives."

¹⁸ Ainscow, "Education for All: Making It Happen."

Kebijakan

Kebijakan dalam konteks ini berkaitan dengan arsitektur sekolah, prasarana (misalnya buku *braille*) untuk belajar, dukungan bagi guru baru (khususnya *resource teacher* dan *learning support teacher*) dan siswa, serta kebijakan internal sekolah dan kurikulum¹⁹.

Sebuah studi yang dilakukan di Banda Aceh melaporkan kurangnya dukungan terhadap pendidikan inklusif²⁰. Cukup sulit untuk menemukan pengembangan dalam arsitektur sekolah dan penyediaan prasarana pendukung belajar di kelas. Namun, rencana inklusi dan pengawasan dari pihak pemerintah dapat ditemukan di beberapa sekolah, meskipun kegagalan pelaksanaan, khususnya dalam pemahaman sekolah terkait kebijakan kurikulum inklusif dan implementasi, masih ada.

Kekurangan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari terbatasnya jumlah sekolah luar biasa dan komunikasi yang buruk antara sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dalam konteks pendidikan inklusif, sekolah-sekolah luar biasa adalah pusat sumber atau pusat pengetahuan. Ia memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan dan pengawasan bagi sekolah inklusif dan juga melakukan pelatihan untuk guru, mengembangkan mata pelajaran dan metode inklusif, mendukung orang tua, memberikan bantuan untuk pembelajaran siswa, serta mengadvokasi para siswa ketika mereka memasuki pasar tenaga kerja²¹.

Kurang cakupannya pemerintah daerah Aceh juga tercermin dari pengelolaan pendidikan inklusif yang tidak maksimal, termasuk di ibukota provinsi yaitu Banda Aceh²². Dari dua puluh tiga kabupaten di Aceh, hanya sembilan yang memiliki pusat sumber²³ untuk mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus di Aceh. Hal ini tentu timpang dengan Pergub Aceh Nomor 92 Tahun 2012 yang menyebutkan setidaknya harus ada minimal satu sekolah dari setiap jenjang pendidikan (TK hingga SMA) di setiap kecamatan di Aceh. Sekolah inklusif sendiri membutuhkan pengawasan yang terus-menerus dari pusat sumber di mana *resource teacher* dan *learning support teacher* adalah spesialis inklusif yang penting sekali perannya dalam

¹⁹ Booth and Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*.

²⁰ Wati, "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh."

²¹ Cor J W Meijer, "Special Needs Education in Europe: Inclusive Policies and Practices," *Zeitschrift Für Inklusion*, 2010.

²² Mudhafar Anzari, A Hamid Sarong, and M Nur Rasyid, "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018), p. 57-73.

²³ Antara, "Aceh Ingin Terdepan Selenggarakan Pendidikan Inklusif," Antara.com, January 10, 2014, <https://aceh.antaranews.com/berita/3121/aceh-ingin-terdepan-selenggarakan-pendidikan-inklusif>.

bekerja sama dengan guru kelas untuk mencapai pendidikan inklusif yang lebih efektif²⁴.

Sayangnya, proses pengembangan jumlah guru dalam konteks pendidikan luar biasa terhambat, salah satunya adalah ketiadaan perguruan tinggi lokal di Aceh yang menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Sebagai solusi, pemerintah Aceh sempat membuat Nota Kesepahaman dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, untuk mengirim mahasiswanya untuk belajar Pendidikan Luar Biasa²⁵. Namun, kebijakan ini tentu perlu dukungan jangka Panjang, salah satunya dengan mendorong kampus-kampus negeri dan swasta di Aceh untuk mendirikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa agar kuantitas guru-guru spesialis pendidikan inklusif dapat dijaga dengan lebih baik.

Akibatnya, dengan menilai fakta-fakta bahwa aspek kebijakan inklusi di Aceh belum kokoh, peneliti berpendapat bahwa pemerintah daerah Aceh masih perlu bekerja keras dalam memantapkan kebijakan pendidikan inklusif, termasuk faktor pendukung lainnya seperti mendorong pendirian Program Studi Pendidikan Luar Biasa di perguruan-perguruan tinggi lokal di Aceh. Selain itu, menilai bahwa Pergub sebelumnya mengenai pendidikan inklusif didesain pada tahun 2012, sudah selayaknya Pemerintah Aceh berupaya melakukan penyesuaian kembali dengan data-data terbaru di lapangan, tentunya dengan melibatkan peran akademisi, guru, orang tua, dan organisasi-organisasi orang berkebutuhan khusus di level provinsi.

Implementasi

Pelaksanaan pendidikan inklusif adalah tindakan yang didasarkan pada pemahaman tentang budaya inklusif dan kebijakan yang sedang dilakukan oleh semua anggota masyarakat, baik di dalam atau di luar sekolah²⁶.

Temuan bahwa Pemerintah provinsi Aceh belum berhasil membangun budaya dan kebijakan, berhubungan erat dengan kesulitan yang sekolah-sekolah hadapi dalam menerapkan praktik-praktik pendidikan inklusif. Bahkan, implementasi di ibu kota Aceh sendiri yaitu Banda Aceh yang diharapkan bisa menjadi panutan bagi kabupaten lain, tidak berjalan dengan baik. Pemerintah tampak terburu-buru dalam mendeklarasikan kebijakan tersebut tanpa mengidentifikasi secara tepat

²⁴ Monica Mulholland and Una O'Connor, "Collaborative Classroom Practice for Inclusion: Perspectives of Classroom Teachers and Learning Support/Resource Teachers," *International Journal of Inclusive Education* 20, no. 10 (2016), p. 1070-83.

²⁵ Nasir Yusuf, "Aceh Krisis Guru Bidang Studi Khusus Pendidikan Luar Biasa," *Serambi Indonesia*, April 17, 2016.

²⁶ Booth and Ainscow, *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*.

pernerimaannya dalam perspektif sosial dan sumber dayanya dalam hal aspek pendidikan.

Sebuah studi menemukan, guru-guru di sekolah inklusif di Aceh masih menjumpai kendala dalam menangani siswa berkebutuhan khusus dalam hal penyampaian materi, penggunaan media ajar, serta kendala kurangnya waktu²⁷. Kendala yang sama juga masih ditemukan di studi lain di Aceh, di mana guru-guru bukan saja tidak mampu menangani anak berkebutuhan khusus, namun dihadapkan pada realitas kurangnya dukungan pengembangan diri termasuk sarana dan prasarana²⁸.

Sementara itu, studi lain di Banda Aceh menemukan tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif antara lain: ketiadaan guru bimbingan khusus; kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana; serta stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus²⁹. Di sisi lain, sebuah penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya, menemukan bahwa kurang lengkapnya pangkalan data mengenai sebaran anak berkebutuhan khusus turut mempengaruhi secara negatif penanganan pendidikan inklusif di daerah tersebut³⁰. Selain itu, studi yang sama juga menyebutkan kurangnya pengetahuan penyelenggara pendidikan terhadap pendidikan inklusif, justru membuat implementasi bersifat segregatif, yang notabene kurang sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif.

Namun, terlepas dari kekurangannya, peneliti percaya bahwa kebijakan ini tetap mesti didukung oleh setiap elemen masyarakat Aceh. Paling tidak, Pemerintah daerah Aceh telah mulai berpikir tentang orang-orang berkebutuhan khusus sebagai manusia yang memiliki hak setara untuk akses pendidikan, tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara kolaboratif dalam masyarakat. Sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, ditemukan di beberapa daerah di mana masyarakat berkebutuhan khusus dibelenggu, dirantai, dikunci, atau disembunyikan di rumahnya karena terbatasnya informasi tentang cara perlakuan mereka dengan benar. Di beberapa lokasi, kebutuhan khusus anak-anak, yang yang seharusnya pergi ing ke sekolah, juga dieksploitasi sebagai pengemis³¹. Oleh karena itu, peneliti percaya

²⁷ Nurhadisah Nurhadisah, "Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Dayah: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2019): 201–11.

²⁸ Yawma Wulida, "Kendala Guru Dalam Menangani Anak Berkebutuhan Khusus Pada Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Banda Aceh (Sd Negeri 1, 5, 54)," *Etd Unsyiah*, 2020.

²⁹ Afnizar Sopa, "Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusif Di SDN 54 Kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

³⁰ Khausar Khausar, "Pemetaan Potensi Sekolah Inklusif Berbasis Welcoming Schools Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdn Luar Biasa Kabupaten Aceh Barat Daya," *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2018).

³¹ Siti Qorrothu Aini, "Fenomena Kekerasan Di Sekolah (School Bullying) Pada Remaja Di Kabupaten Pati," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan*

bahwa kebijakan pendidikan inklusif membawa harapan tidak hanya untuk kebutuhan orang-orang khusus, tetapi juga untuk semua anggota masyarakat. Kebijakan ini akan mempromosikan lebih banyak kesetaraan sosial yang memiliki hubungan kuat dengan inklusi sosial dan kesejahteraan masyarakat³².

Solusi

Peneliti berpendapat Pemerintah daerah Aceh mesti memberikan perhatian lebih pada pembangunan budaya inklusif karena aspek tersebut merupakan tahap pertama dari praktik inklusif yang baik. Di samping itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan menggunakan *strategic leadership method*³³, yaitu: 1) menyiapkan visi dan misi; 2) menciptakan capaian organisasi yang luas; 3) membentuk goals tiga hingga lima tahun ke depan 4) merencanakan gambaran tindakan jangka pendek; 5) mempertimbangkan evolusi organisasi; dan 6) menggunakan pemikiran strategis lebih dari perencanaan strategis. Alasan mengapa peneliti menyarankan pemerintah untuk melakukannya karena mereka tidak menunjukkan pemahaman mendalam terhadap konsep dan sumber daya organisasi untuk mencapai implementasi ideal dari pendidikan inklusif. Selain itu, dalam konteks Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa organisasi swasta seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga nirlaba sulit untuk terlibat atau ambil bagian dalam suatu kebijakan pemerintah, kecuali pemerintah sendiri yang membuka ruang untuk itu. Dengan kata lain, untuk sebuah kebijakan seperti pendidikan inklusif di Aceh, pemerintah memainkan peran yang sangat penting sebagai salah satu aktor utama.

Selanjutnya, pemerintah mesti mempertimbangkan untuk mengadakan lebih banyak sosialisasi atau seminar di sekolah, universitas, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya.

Sekolah, terutama guru, adalah jantung dari pendidikan inklusif. Mereka lebih penting daripada sumber daya itu sendiri karena merekalah yang secara langsung akan mengajar siswa. Faktor penting berikutnya adalah siswa reguler. Mereka dapat membantu siswa berkebutuhan khusus dalam proses integrasi sosial yang ramah di kelas³⁴. Selain itu, sekolah perlu

Dan IPTEK 12, no. 1 (2016): 51–60, <https://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/52>.

³² Ruth Lister, "From Equality to Social Inclusion: New Labour and the Welfare State," *Critical Social Policy* 18, no. 55 (1998), p. 215–25.

³³ Barbara J Davies and Brent Davies*, "Strategic Leadership," *School Leadership & Management* 24, no. 1 (2004), p.29–38.

³⁴ Teja Lorger, Majda Schmidt, and Karin Bakračević Vukman, "The Social Acceptance of Secondary School Students with Learning Disabilities (LD)," *Center for Educational Policy Studies Journal* 5, no. 2 (2015), p. 177–94.

juga memupuk pemahaman di antara siswa reguler agar siap dan memahami makna belajar secara kolaboratif dengan siswa berkebutuhan khusus. Apalagi dalam konteks Indonesia, kata-kata seperti 'tuli', 'buta', dan 'cacat' kadang-kadang menjadi makian atau ejekan. Apabila kolaborasi dan interaksi hangat terjadi antara siswa reguler dan berkebutuhan khusus, akan sangat menarik melihat mereka berkembang dalam hal akademik dan sosial³⁵.

Universitas juga berperan penting dalam mendukung perubahan di sekolah³⁶ dan menghasilkan lulusan yang memiliki spesialisasi dalam pendidikan luar biasa dan/atau inklusif. Oleh karena itu, selain mengirimkan siswa daerah setiap tahun untuk belajar di universitas di luar Provinsi Aceh, peneliti sangat menyarankan agar pemerintah daerah mendorong dan mendukung perguruan-perguruan tinggi lokal untuk mendirikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Atau minimal, pemerintah daerah mesti mendorong perguruan-perguruan tinggi agar setidaknya menambahkan Pendidikan Inklusif sebagai salah satu mata kuliah di dalam kurikulum pendidikan tinggi mereka. Hal ini mengingat setiap tahun, jumlah siswa berkebutuhan khusus berpotensi terus mengalami peningkatan, dan tanpa pendidikan yang cukup, calon-calon guru di masa depan akan mengalami kesulitan. Di samping itu, penting juga bagi pemerintah daerah untuk secara intens mengadakan pelatihan pengembangan diri bagi guru-guru sekolah inklusif yang di berbagai sekolah di Aceh. Fakta bahwa masih saja ditemukan guru yang sulit menangani siswa berkebutuhan khusus, mengindikasikan mereka belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengelola kelas inklusif.

Dalam hal pekerjaan, hak penyandang kebutuhan khusus sebenarnya didukung oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang 'Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas'. Namun, mereka masih sulit mendapatkan pekerjaan baik di perusahaan swasta maupun negara. Alasannya barangkali karena sebagian perusahaan cenderung terlalu fokus dengan ketidakmampuan daripada kemampuan mereka. Selain itu, orang-orang berkebutuhan khusus masih berhadapan dengan stigma negatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi intens mengenai masalah ini ke perusahaan-perusahaan. Selain itu, penting untuk sekali lagi menyediakan pendidikan tinggi yang suportif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus agar jumlah lulusan berbanding lurus dengan permintaan di dunia kerja. Hal ini misalnya tercermin dari kurangnya pelamar formasi disabilitas pada tes Pegawai Negeri Sipil yang

³⁵ Charmaine Sullivan-Sego, YeonSun Ro, and Jeonga Park, "Including All Learners with Diverse Abilities," *Childhood Education* 92, no. 2 (2016), p. 134-39.

³⁶ Jesper Holst, "Supporting Change in Schools," *British Journal of Special Education* 24, no. 2 (1997), p. 76-79.

mencerminkan kurangnya jumlah orang berkebutuhan khusus yang melanjutkan pendidikan di level perguruan tinggi³⁷.

Secara umum, pemerintah mesti menyusun strategi bagaimana agar isu pendidikan inklusif ini dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, salah satunya misalnya dengan mengakomodasi budaya dan kearifan masyarakat. Kebijakan yang bersifat sentralistik, tak jarang membuat sekolah mesti beradaptasi secara radikal dalam menerapkan pendidikan inklusif³⁸ yang jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan ‘efek kejut’ yang tidak dikehendaki atau negatif. Pemerintah Aceh juga perlu membuka tangan terhadap ide-ide baru yang muncul, misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif secara masif di dayah-dayah (pesantren) Aceh³⁹. Institusi pendidikan seperti dayah yang menyebar di seluruh Aceh serta memiliki kekuatan kultural yang besar di tengah masyarakat berpotensi menjadi katalisator budaya yang baik untuk penyebaran budaya serta ide-ide pendidikan inklusif.

Kesimpulan

Dengan temuan bahwa budaya, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan inklusif di Aceh belum berjalan dengan baik, Pemerintah Aceh perlu kerja keras untuk mengembangkan aspek-aspek tersebut. Kolaborasi menyeluruh antara pemerintah dan aktor-aktor utama pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat, sangat penting untuk menyukseskan kebijakan pendidikan inklusif di tengah masyarakat.

Peneliti menyarankan pemerintah untuk menerapkan teori *Index for Inclusion* dengan memfokuskan pergerakan dengan pertama kali memperkuat budaya inklusif, baru kemudian beralih ke proses pendesainan kebijakan dan implementasinya. Peneliti juga berharap Pemerintah Aceh dapat mengeluarkan Pergub atau kebijakan yang lebih baru mengenai pendidikan inklusif secara kolaboratif dengan berbagai pihak.

Sebagai penutup, semua anggota masyarakat mesti memahami bahwa proses inklusi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Orang berkebutuhan khusus adalah manusia. Mereka tidak pantas dikurung, dibelenggu, didiskriminasi, atau ditinggalkan. Mereka memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang indah dan bermakna sama seperti manusia lainnya.

³⁷ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta* (LKIS Pelangi Aksara, 2016).

³⁸ Reno Fernandes, “Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif,” *SOCIUS* 4, no. 2 (2018), p.119-25.

³⁹ Almuhammad Almuhammad, “Manajemen Dayah Inklusif: Pendidikan Alternatif Bagi Anak Tunanetra Aceh,” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020), p. 41-58.

Daftar Pustaka

- Aini, Siti Qorrotu. "Fenomena Kekerasan Di Sekolah (School Bullying) Pada Remaja Di Kabupaten Pati." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 12, no. 1 (2016).
- Ainscow, Mel. "Education for All: Making It Happen." *Support for Learning* 10, no. 4 (1995).
- Almuhajir, Almuhajir. "Manajemen Dayah Inklusif: Pendidikan Alternatif Bagi Anak Tunanetra Aceh." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020).
- Antara. "Aceh Ingin Terdepan Selenggarakan Pendidikan Inklusif." *Antara.com*, January 10, 2014. <https://aceh.antaranews.com/berita/3121/aceh-ingin-terdepan-selenggarakan-pendidikan-inklusif>.
- Anzari, Mudhafar, A Hamid Sarong, and M Nur Rasyid. "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018).
- Ayuningtyas, Dian, Rahmad Syah Putra, and Della Defyanti. Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) Di Paud Terpadu Griya Ceriya Banda Aceh, 2019.
- Booth, Tony, and Mel Ainscow. *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. ERIC, 2002.
- Bowen, Glenn A. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 2009.
- Daturrohmah, Istifa, Syaiful Bahri, and Fajriani Fajriani. "Penerimaan Sosial Warga Sekolah Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Pada SMPN Inklusi Di Banda Aceh." *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling* 5, no. 3 (2020).
- Davies, Barbara J, and Brent Davies*. "Strategic Leadership." *School Leadership & Management* 24, no. 1 (2004).
- Fernandes, Reno. "Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif." *SOCIUS* 4, no. 2 (2018).
- Gubernur Aceh. "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif." Banda Aceh, Indonesia, 2012. <https://tkppa.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/15/peraturan-gubernur-aceh-92-tahun-2012.html>.
- Hasan, Muhammad. Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 54 Yayasan Tahija Banda Aceh (Suatu Kajian Tentang Interaksi Edukatif). *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2016).
- Holst, Jesper. "Supporting Change in Schools." *British Journal of Special Education* 24, no. 2 (1997).
- Irwanto, I. *Analysis On The Situation Of People With Disability In Indonesia: A Desk Review*. Jakarta: Centre For Disability Studies, University of Indonesia, 2010.
- Khausar, Khausar. "Pemetaan Potensi Sekolah Inklusif Berbasis Welcoming

- Schools Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdn Luar Biasa Kabupaten Aceh Barat Daya." *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2018).
- Lee, Lay Wah, and Hui Min Low. "'Unconscious' Inclusion of Students with Learning Disabilities in a Malaysian Mainstream Primary School: Teachers' Perspectives." *Journal of Research in Special Educational Needs* 13, no. 3 (2013).
- Lister, Ruth. "From Equality to Social Inclusion: New Labour and the Welfare State." *Critical Social Policy* 18, no. 55 (1998).
- Lorger, Teja, Majda Schmidt, and Karin Bakračević Vukman. "The Social Acceptance of Secondary School Students with Learning Disabilities (LD)." *Center for Educational Policy Studies Journal* 5, no. 2 (2015).
- Meijer, Cor J W. "Special Needs Education in Europe: Inclusive Policies and Practices." *Zeitschrift Für Inklusion*, 2010.
- Meutia, Cut A. "Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *Serambi Indonesia*, April 3, 2014. <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/03/pendidikan-inklusif-bagi-anak-berkebutuhan-khusus>.
- Mulholland, Monica, and Una O'Connor. "Collaborative Classroom Practice for Inclusion: Perspectives of Classroom Teachers and Learning Support/Resource Teachers." *International Journal of Inclusive Education* 20, no. 10 (2016).
- Nurhadisah, Nurhadisah. "Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Dayah: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2019).
- Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*. LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Sopa, Afnizar. "Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusif Di SDN 54 Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Sullivan-Sego, Charmaine, YeonSun Ro, and Jeonga Park. "Including All Learners with Diverse Abilities." *Childhood Education* 92, no. 2 (2016).
- Wati, Ery. "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 14, no. 2 (2014).
- Wulida, Yawma. "Kendala Guru Dalam Menangani Anak Berkebutuhan Khusus Pada Program Pendidikan Inklusi Di Sd Negeri Banda Aceh (Sd Negeri 1, 5, 54)." *Etd Unsyiah*, 2020.
- Yusuf, Nasir. "Aceh Krisis Guru Bidang Studi Khusus Pendidikan Luar Biasa." *Serambi Indonesia*, April 17, 2016.